

KEMENTERIAN KEUANGAN
KANWIL DJKN DKI JAKARTA
KPKNL JAKARTA IV

LAPORAN KEUANGAN AUDITED
KPKNL JAKARTA IV
TINGKAT UAKPA
TAHUN ANGGARAN 2022



KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta IV adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun Laporan Keuangan Tahunan (audited) Tahun Anggaran 2018 berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta IV mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2019 ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawabandan transparansi pengelolaan Keuangan Negara pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta IV. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, 5 Mei 2023



Ditandatangani secara elektronik
Karman



DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	v
Ringkasan Laporan Keuangan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	4
II. Neraca	5
III. Laporan Operasional	6
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	7
V. Catatan atas Laporan Keuangan	8
A. Penjelasan Umum	8
A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta IV	8
A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	9
A.3. Basis Akuntansi	9
A.4. Dasar Pengukuran	9
A.5. Kebijakan Akuntansi	10
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	19
B.1. Pendapatan	20
B.2. Belanja	21
B.3. Belanja Pegawai	22
B.4. Belanja Barang	23
B.5. Belanja Modal	23
B.5.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24
B.6. Belanja COVID-19	25
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	26
C.1. Kas di Bendahara Pengeluaran	26
C.2. Kas di Bendahara Penerimaan	26
C.3. Kas Lainnya dan Setara Kas	27
C.4. Piutang Bukan Pajak	28
C.5. Persediaan	28
C.6. Peralatan dan Mesin	29
C.7. Aset Tetap Lainnya	30
C.8. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	30
C.9. Aset Lain-Lain	31
C.10. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	31
C.11. Utang kepada Pihak Ketiga	32
C.12. Utang belum Ditagihkan	32
C.13. Uang Muka dari KPPN	33



C.14 Utang Jangka Pendek Lainnya	33
C.15 Ekuitas	34
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	35
D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	35
D.2 Beban Pegawai	35
D.3 Beban Persediaan	36
D.4 Beban Barang dan Jasa	36
D.5 Beban Pemeliharaan	37
D.6 Beban Perjalanan Dinas	38
D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi	40
D.8 Belanja COVID-19	41
D.9 Kegiatan Non Operasional	41
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	43
E.1 Ekuitas Awal	43
E.2 Surplus (Defisi) LO	43
E.3 Penyesuaian Nilai Aset	43
E.4 Koreksi Nilai Persediaan	43
E.5 Selisih Revaluasi Aset Tetap	43
E.6 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	44
E.7 Koreksi Lain-Lain	44
E.8 Transaksi Antar Entitas	44
E.9 Ekuitas Akhir	45
F. Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya	46



Lampiran-lampiran Pendukung

Neraca Percobaan

LRA Belanja dan LRA Pengembalian Belanja

LRA Pendapatan dan Pengembalian Pendapatan

BAR Rekonsiliasi dengan KPPN Jakarta II

Formulir Memo Penyesuaian

BA Internal PNB

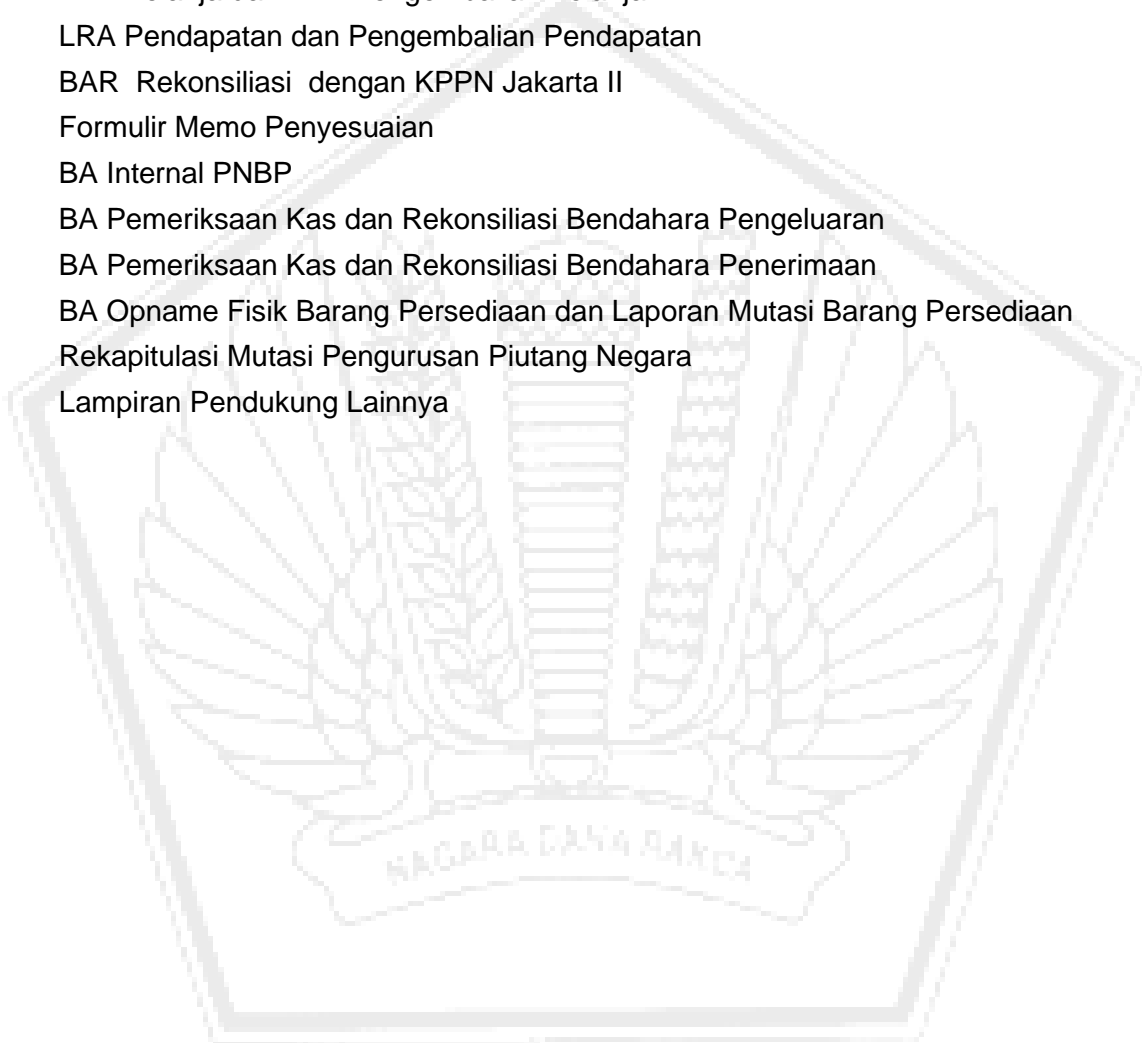
BA Pemeriksaan Kas dan Rekonsiliasi Bendahara Pengeluaran

BA Pemeriksaan Kas dan Rekonsiliasi Bendahara Penerimaan

BA Opname Fisik Barang Persediaan dan Laporan Mutasi Barang Persediaan

Rekapitulasi Mutasi Pengurusan Piutang Negara

Lampiran Pendukung Lainnya



KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA IV

Jl. PRAJURIT KKO USMAN DAN HARUN NOMOR 10 JAKARTA PUSAT
TELEPON 021 3448363,3440910, FAXIMILE 021 3448363

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta IV yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 5 Mei 2023



Ditandatangani secara elektronik
Karman



**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
JAKARTA IV**

*Jl. PRAJURIT KKO USMAN DAN HARUN NOMOR 10 JAKARTA PUSAT
TELEPON 021 3448363,3440910, FAXIMILE 021 3448363*



RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta IV Tahun Anggaran 2022 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan, Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022.

Realisasi Pendapatan Negara pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta IV Tahun Anggaran 2022 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp52.882.923.451,- atau mencapai 352 persen dari estimasi pendapatan-LRA sebesar Rp15.002.580.000,-.

Realisasi Belanja Negara pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp1.453.644.424,- atau mencapai 85 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp1.705.065.000,-.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2022.

Nilai Aset per 31 Desember 2022 dicatat dan disajikan sebesar Rp21.347.695.181,- yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp20.757.533.094,- Aset Tetap (neto) sebesar Rp590.162.087,- dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0,-.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp20.678.274.488,- dan Rp669.420.693,-. Ringkasan Neraca per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 dapat disajikan sebagai berikut:



Ringkasan Neraca per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021
(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2022	31 Des 2021	Kenaikan (Penurunan)	Persentase
Aset				
Aset Lancar	20,757,533,094	1.467.949.812	19,289,583,282	1,314.05
Aset Tetap	590,162,087	668.272.109	(78,110,022)	(11.69)
Aset Lainnya	0	0	0	0
Jumlah Aset	21,347,695,181	2.136.221.921	19,211,473,260	899.32
Kewajiban				
Kewajiban Jangka Pendek				
- Utang kepada Pihak Ketiga	20,678,274,488	1.410.336.513	19,268,825,975	1,366.26
- Uang Muka KPPN	0	0	0	
- Utang Yang Belum Ditagihkan	0	0	0	
Jumlah Kewajiban	20,678,274,488	1,410,336,513	19,268,825,975	1,366.26
Ekuitas				
Ekuitas	669,420,693	725.885.408	(57,352,715)	(7.90)
Jumlah Ekuitas	669,420,693	725.885.408	(57,352,715)	(7.90)
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	21,347,695,181	2.136.221.921	19,211,473,260	899.32

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp52.882.923.451,- sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp1.624.755.264,- sehingga terdapat surplus dari Kegiatan Operasional sebesar



Rp52.882.923.451,-. Kegiatan Non Operasional dan Pos Luar Biasa masing-masing surplus sebesar Rp0 dan Rp.0,- sehingga entitas mengalami Surplus-LO sebesar Rp51.259.056.187,-

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2021 sebesar Rp725.885.408,- ditambah Surplus-LO sebesar Rp51.259.056.187,- kemudian dikurangi dengan Koreksi Lain-lain senilai Rp0 dan koreksi-koreksi senilai Rp0,- dikurangi Transaksi Antar Entitas sebesar Rp(51.315.520.902) sehingga ekuitas mengalami kenaikan sebesar Rp(56.464.715). Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2022 adalah senilai Rp669.420.693,-

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2022 disusun dan disajikan dengan basis akrual.



I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA IV
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2022 dan
31 Desember 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA. 2022		% thd. Angg	TA. 2021
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.	15,002,580,000	52,882,923,451	352	19,476,698,543
JUMLAH PENDAPATAN		15,002,580,000	52,882,923,451	352	19,476,698,543
BELANJA	B.2				
Belanja Pegawai	B.3	0	0	0	570,135,059
Belanja Barang	B.4	1,705,065,000	1,453,644,424	85	1,467,430,978
Belanja Modal	B.5	0	0	0	0
JUMLAH BELANJA		1,705,065,000	1,453,644,424	85	1,467,430,978



II. NERACA

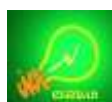
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA IV

NERACA

PER 31 Desember 2022 DAN 31 Desember 2021

(dalam Rp)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2022	31 Des 2021
ASET			
Aset Lancar	C		
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	0	0
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	0	1,408,561,642
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	20,677,480,005	0
Piutang Bukan Pajak	C.4	0	0
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	C.4		0
Persediaan	C.5	80,053,089	59,388,170
Jumlah Aset Lancar		20,757,533,094	1,467,949,812
Aset Tetap			
Peralatan dan Mesin	C.6	4,253,400,878	4,182,705,878
Aset Tetap Lainnya	C.7	8,743,450	8,743,450
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.8	(3,723,882,241)	(3,523,177,219)
Jumlah Aset Tetap		590,162,087	668,272,109
Aset Lainnya			
Aset Lain-Lain	C.9	0	0
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.10	0	0
Jumlah Aset Lainnya		0	0
JUMLAH ASET		21,347,695,181	2,136,221,921
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek			
Uang Muka dari KPPN	C11	0	0
Utang kepada Pihak Ketiga	C12	20,678,274,488	1,410,336,513
Utang Yang Belum Ditagihkan	C13	0	0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		20,678,274,488	1,410,336,513
JUMLAH KEWAJIBAN		20,678,274,488	1,410,336,513
EKUITAS			
Ekuitas	C.14	669,420,693	725,885,408
Jumlah Ekuitas		669,420,693	725,885,408
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		21,347,695,181	2,136,221,921



III. LAPORAN OPERASIONAL

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA IV
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2022 DAN 31 Desember 2021

(dalam Rp)

URAIAN	CATATAN	2022	2021
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	52,882,923,451	19,463,840,543
JUMLAH PENDAPATAN		52,882,923,451	19,463,840,543
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai	D.2	0	0
Beban Persediaan	D.3	193,997,999	222,118,450
Beban Barang dan Jasa	D.4	870,918,270	981,050,601
Beban Pemeliharaan	D.5	164,720,190	157,788,600
Beban Perjalanan Dinas	D.6	202,362,658	138,102,862
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	191,868,147	170,624,355
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	D.8	0	0
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL		1,623,867,264	1,669,684,868
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		51,259,056,187	17,794,155,675
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.9		
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		0	12,800,000
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		0	594,000
SURPLUS (DEFISIT) DARI PELEPASAN ASET NON LANCAR		0	12,206,000
KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	0
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	0
Jumlah Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	0
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		0	(12,206,000)
SURPLUS (DEFISIT) LAPORAN OPERASIONAL		51,259,056,187	17,806,361,675



IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA IV
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2022 DAN 31 Desember 2021

(dalam Rp)

URAIAN	CATATAN	2022	2021
EKUITAS AWAL	E.1	725,885,408	541,547,298
SURPLUS (DEFISIT) - LO	E.2	51,259,056,187	17,806,361,675
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI / KESALAHAN MENDASAR		0	0
Penyesuaian Nilai Aset	E.3	0	0
Koreksi Nilai Pesediaan	E.4	0	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E.5	0	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E.6	0	0
Koreksi Lain-Lain	E.7	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.8	(51,315,520,902)	(17,622,023,565)
KENAIKAN (PENURUNAN) EKUITAS		(56,464,715)	184,338,110
EKUITAS AKHIR	E.9	669,420,693	725,885,408



**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
JAKARTA IV**

*Jl. PRAJURIT KKO USMAN DAN HARUN NOMOR 10 JAKARTA PUSAT
TELEPON 021 3448363,3440910, FAXIMILE 021 3448363*



V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA IV

Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana Strategis

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta IV didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga sesuai dengan PMK 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal. berkedudukan di Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun Nomor 10 Jakarta Pusat.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta IV mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta IV berkomitmen dengan visi *“mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan keuangan negara yang efisien, akuntabel dan transparan melalui pembinaan akuntansi pemerintah menuju Laporan Keuangan Kementerian/Negara yang berkualitas*

Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Menyenggarakan yang berkelanjutan berkaitan implementasi akuntansi pemerintah kepada Kementerian Negara/Lembaga.
- Membina secara efektif Kementerian Negara/Lembaga dalam pemanfaatan informasi keuangan yang dihasilkan oleh sistem akuntansi yang diimplentasikan.
- Mengembangkan sistem pembinaan yang profesional dan terpercaya.
- Menyenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal kepada para pemangku kepentingan.



A.2. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta IV. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI yang dipakai pada saat ini adalah Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). SAKTI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas, informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3 Basis Akuntansi

Basis Akuntansi

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta IV menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4 Dasar Pengukuran

Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang



Jakarta IV dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5 Kebijakan Akuntansi

*Kebijakan
Akuntansi*

Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-atruan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta IV. Disamping itu, dalam penyusunannya telah ditetapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta IV adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan – LRA

Pendapatan –LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.



2. Pendapatan – LO

Pendapatan –LO

- Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasikan, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan Republik Indonesia sesuai SE-17/MK.1/015 adalah sebagai berikut :
 - Penerimaan Bea Lelang Penjual dan Pembeli atas lelang non eksekusi oleh Pejabat Lelang Kelas II;
 - Penerimaan atas Kertas Sekuriti untuk Pembuatan Kutipan Risalah Lelang bagi Pejabat Lelang Kelas II;
 - Penerimaan Bea Lelang Penjual dan Pembeli atas Lelang Pegadaian;
 - Penerimaan atas Pengangkatan Pejabat Lelang Kelas II;
 - Penerimaan Pemberian Izin Operasional Balai Lelang;
 - Penerimaan atas Perpanjangan Masa Jabatan Pejabat Lelang Kelas II;
 - Penerimaan denda Keterlambatan Penyetoran Bea Lelang Ke Kas Negara oleh Balai Lelang atau Pejabat Lelang Kelas II;
 - Penerimaan Bea Lelang Batal atas Permintaan Penjual;
 - Penerimaan Bea Lelang Penjual dan Pembeli atas lelang Eksekusi, Non Eksekusi oleh Pejabat Lelang Kelas I dan Lelang Kayu hasil Hutan lainnya dari tangan pertama;
 - Penerimaan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara dari Penanggung Hutang;
 - Penerimaan Uang Jaminan Penawaran Lelang dari Pembeli Wanprestasi;
 - Penerimaan atas Uang Jaminan Penawaran Lelang Yang Tidak Diambil;
 - Penerimaan Kelabihan Hasil Bersih Lelang PUPN yang Tidak Diambil oleh Penanggung Hutang dan/ atau Penjamin Hutang;
 - Penerimaan Pemohon Lelang Tidak Bersedia Mengambil/



mencairkan Cek/BG Menerima Hasil Bersih Lelang;

➤ Penyetoran atas Penerimaan Piutang Yang Tidak Jelas.

(*Kementerian Negara/Lembaga agar menyesuaikan pengakuan Pendapatan-LO sesuai karakteristik pendapatan masing-masing entitas).

- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

3. Belanja

Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4. Beban

Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.



5. Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

Aset
Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.

Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%



Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai bagian lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,- (dua puluh

Aset Tetap



lima juta rupiah);

c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan Antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pekerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Perhitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman

*Penyusutan Aset
Tetap*



Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum table masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Kelompok Aset Tetap

KELOMPOK ASET TETAP	MASA MAFAAT
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 Tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan

Piutang Jangka Panjang

Aset Lainnya



berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

KELOMPOK ASET TAK BERWUJUD	MASA MAFAAT
Software Komputer	4 tahun
Franchise	5 tahun
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10 tahun
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20 tahun
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman	25 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70 tahun

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintahan yang disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

6. Kewajiban

Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dan Utang Jangka Pendek Lainnya.



b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

7. Ekuitas

Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih Antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.



**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
JAKARTA IV**

*Jl. PRAJURIT KKO USMAN DAN HARUN NOMOR 10 JAKARTA PUSAT
TELEPON 021 3448363,3440910, FAXIMILE 021 3448363*



B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta IV telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

URAIAN	TA. 2022	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
PENDAPATAN		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	15,002,580,000	15,002,580,000
JUMLAH PENDAPATAN	15,002,580,000	15,002,580,000
BELANJA		
Belanja Pegawai	0	0
Belanja Barang	1,672,259,000	1,705,065,000
Belanja Modal	0	0
JUMLAH BELANJA	1,672,259,000	1,705,065,000



B.1. Pendapatan

Realisasi Pendapatan
Rp52,882,923,451,-

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp52,882,923,451,- atau mencapai 352 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp15,002,580,000,-. Pendapatan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta IV terdiri dari: Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta Pendapatan dari Penjualan; dan Pendapatan Jasa dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

URAIAN	2022		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg
PENDAPATAN JASA			
<i>Pendapatan Jasa Lainnya</i>	0	0	0
<i>Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I</i>	11,355,000,000	31,959,877,772	281.46
<i>Pendapatan Bea Lelang Pegadaian</i>	2,573,000,000	3,899,155,718	151.54
<i>Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara</i>	1,074,580,000	17,023,889,961	1584.24
JUMLAH PENDAPATAN JASA	15,002,580,000	52,882,923,451	352.49
PENDAPATAN LAIN-LAIN			
<i>Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin</i>	0	0	0
<i>Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta Pendapatan dari Penjualan</i>	0	0	0
<i>Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL</i>	0	0	0
<i>Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL</i>	0	0	0
JUMLAH PENDAPATAN LAIN-LAIN	0	0	0
JUMLAH PENDAPATAN	15,002,580,000	52,882,923,451	352.49



Realisasi Pendapatan Jasa TA 2022 mengalami kenaikan sebesar 352.49 persen dibandingkan TA 2021. Hal ini disebabkan oleh kenaikan Pendapatan bea lelang sebesar 281% dan kenaikan pendapatan bea lelang pegadaian sebesar 151% serta kenaikan Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara sebesar 1584 persen.

B.2. Belanja

Realisasi Belanja
Rp1,453,644,424,-

Realisasi belanja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta IV TA 2022 adalah sebesar Rp1,453,644,424,- atau sebesar 85 persen dari pagu belanja senilai Rp1,705,065,000,-. Rincian anggaran dan realisasi belanja Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja
Tahun Anggaran 2022

URAIAN	2022		
	ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI ANGGARAN
Belanja Pegawai	0	0	0
Belanja Barang	1,705,065,000	1,453,644,424	85
Belanja Modal	0	0	0
Total Belanja Kotor	1,705,065,000	1,453,644,424	85
Pengembalian Belanja	0		0
JUMLAH	1,705,065,000	1,453,644,424	85



Dibandingkan dengan TA 2021, realisasi belanja TA 2022 mengalami penurunan sebesar 21 persen. Hal ini disebabkan antara lain sebagai berikut:

- Efisiensi yang cukup besar
- Masih adanya pemberlakuan rapat secara daring untuk menyelesaikan tugas dan fungsi

Perbandingan realisasi Belanja TA 2021 dan 2019

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2022	REALISASI T.A. 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	0	0	
Belanja Barang	1,453,644,424	1,467,430,978	
Belanja Modal	0	387,244,000	
Jumlah Belanja	1,453,644,424	1,854,674,978	(21)

B.3 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai Rp0,-

Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang diperkerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi Belanja Pegawai Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta IV TA 2022 dan TA 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-

Realisasi belanja TA 2021 mengalami penurunan. Hal ini disebabkan antara lain oleh adanya sentralisasi belanja pegawai tahun 2021



Belanja Barang
Rp1,453,644,424,-

B.4 Belanja Barang

Belanja Barang adalah Pengeluaran untuk pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat di luar kriteria belanja bantuan sosial serta belanja perjalanan.

Realisasi Belanja Barang TA 2022 dan TA 2011 adalah masing-masing sebesar Rp1,453,644,424,- dan Rp 1,467,430,978,-.

Hal ini disebabkan oleh penyerapan pagu belanja barang yang efisiensi yang cukup besar yang dilakukan oleh KPKNL Jakarta IV.

B.5 Belanja Modal

Belanja Modal Rp0,-

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal TA 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp 7,194,000,-.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2021 mengalami penurunan 100 persen dibandingkan TA 2019 disebabkan pengurangan pagu terkait penghematan COVID-19.

*Perbandingan Belanja Modal
TA 2021 dan TA 2019*

Uraian	Realisasi TA 2022	Realisasi TA 2021	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	7,194,000	100



Belanja Modal Lainnya	0	0	0
Jumlah Belanja Kotor	0	7,194,000	100
Pengembalian	0	0	0
Jumlah Belanja Bersih	0	7,194,000	100

B.5.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja modal peralatan dan mesin adalah Pengeluaran untuk pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2021 adalah sebesar Rp0,- mengalami penurunan 100 persen bila dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp319.877.500,-. Hal ini disebabkan oleh penghematan dalam rangka penanganan COVID-19 pada belanja modal pada tahun 2021.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2021 dan 2019

Uraian	Realisasi TA 2022	Realisasi TA 2021	Naik (Turun)%
Filing Cabinet		0	
Layar Proyektor			
Printer Laserjet (B/W)			
Kursi Rapat			
Kendaraan Operasional Roda 4		0	
Kendaraan Operasional Roda 2		0	
Dry Box		0	
Meja Pop Up Counter		0	
Rak Arsip		0	
Jumlah Belanja Kotor		7,194,000	100
Pengembalian		0	



Jumlah Belanja Bersih		7,194,000	100
------------------------------	--	-----------	------------

B.6 Belanja COVID-19

Belanja COVID-19 merupakan pengeluaran anggaran untuk menangani dan mencegah penyebaran COVID-19 di Lingkungan Kantor Pelayanan kekayaan negara dan Lelang Jakarta IV

Realisasi Belanja COVID-19 TA 2022 adalah masing-masing sebesar

Uraian	Realisasi TA 2022
Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi	20,432,260
- Belanja Jasa	9,666,000
Total	30,098,260
Jumlah Belanja Bersih	30,098,260



**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
JAKARTA IV**

*Jl. PRAJURIT KKO USMAN DAN HARUN NOMOR 10 JAKARTA PUSAT
TELEPON 021 3448363,3440910, FAXIMILE 021 3448363*



C. PENJELASAN ATAS POS- POS NERACA

C.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

*Kas di Bendahara
Pengeluaran Rp 0,-*

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,- uang setoran milik pihak ketiga dan bukan berasal yang bukan berasal dari UP/TUP. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp0,- yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

No.	KETERANGAN	TA. 2022	TA.2019
1.	Bank No. acc 013011083 an. BPg 019 KPKNL Jakarta IV	0	0
2.	Uang Tunai	0	0
3.	UM Perjadin	0	0
	JUMLAH	0	0

C.2. Kas di Bendahara Penerimaan

*Kas di Bendahara
Penerimaan
Rp0,-*

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar masing-masing Rp0,- dan Rp1,408,561,642,-. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.



Rincian Kas di Bendahara Penerimaan

No.	KETERANGAN	TA. 2022	TA.2021
1.	Bank No. acc 9154779 an. BPL 019 KPKNL Jakarta IV utk piutang		0
2.	Bank No. acc 9154768 an. BPL 019 KPKNL Jakarta IV utk lelang	0	1,408,561,642
	JUMLAH	0	1,408,561,642

C.3. Kas Lainnya dan Setara Kas

*Kas Lainnya dan
Setara Kas
Rp20,677,480,005,-*

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp20,677,480,005,- dan Rp0,-.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara Kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas

Keterangan	Tahun 2022	Tahun 2021
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	0	0
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	20,677,480,005	0
Jumlah	0	0



Piutang Bukan Pajak
Rp0,-

C.4 Piutang Bukan Pajak dan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak

Piutang bukan pajak adalah piutang yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan. Penyisihan piutang tidak tertagih – bukan pajak adalah pencadangan/penyisihan piutang tidak tertagih dengan cara mengestimasi besarnya piutang-piutang yang tidak akan tertagih dan kemudian mencatat dan menyajikan nilai estimasi tersebut sebagai penyisihan piutang tidak tertagih, yang mengurangi nilai piutang bruto.

Saldo Piutang Bukan Pajak (netto) per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-.

Rincian Piutang Bukan Pajak per per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut.

Keterangan	2022	2021
Piutang Bukan Pajak	0	0
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak	0	0
Piutang Bukan Pajak (netto)	0	0

C.5 Persediaan

Persediaan
Rp80,053,089,-

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Nilai Persediaan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp 80,053,089,- dan Rp 59,388,170,-

Rincian Persediaan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:



Rincian Persediaan

No	Uraian	2022	2021
1	Barang Konsumsi	80,053,089	59,388,170
2	Barang Untuk Pemeliharaan		
3	Suku Cadang		
4	Bahan Baku		
5	Persediaan Lainnya		
	Jumlah	80,053,089	59,388,170

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik. Terdapat barang konsumsi senilai Rp0 Berada dalam kondisi rusak atau usang dan tidak disajikan dalam persediaan.

C.6 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin
Rp4,305,300,878,-

Peralatan dan mesin adalah berupa mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah Rp4,305,300,878,- dan Rp 4,182,705,878,-. Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:



Saldo per 31 Desember 2021	4,182,705,878
Mutasi Tambah:	
- Pembelian	
- Transfer Masuk	122.595.000
- Reklasifikasi Masuk	-
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	-
- Transaksi Normalisasi Aset	-
Mutasi Kurang:	
- Penghentian Aset dari Penggunaan	
- Reklasifikasi Keluar	-
- Penyusutan Reguler	-
Saldo per 31 Desember 2022	4,305,300,878
Akumulasi Penyusutan s.d. per 31 Desember 2022	(3,723,882,241)
Nilai Buku per 31 Desember 2022	581.418.637



C.7. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya
Rp 8,743,450

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah Rp 8,743,450 dan Rp 8,743,450. Aset tetap tersebut berupa buku-buku perpustakaan. Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan, sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	8,743,450
Mutasi Tambah:	
- Pembelian	0
Mutasi Kurang:	
-	0
Saldo per 31 Desember 2022	8,743,450
Akumulasi Penyusutan s.d. per 31 Desember 2022	0
Nilai Buku per 31 Desember 2022	8,743,450

C.8. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap
Rp(3,723,882,241)

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing Rp(3,723,882,241) dan Rp(3,523,177,219). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	4,305,300,878	(3,723,882,241)	581.418.637
2	Gedung dan Bangunan	0	0	0
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0
4	Aset Tetap Lainnya	8.743.450	0	8.743.450



Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.9. Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain Rp
Rp0-

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah Rp0,- dan Rp0,-. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2021	0
Mutasi Tambah:	
-	0
Mutasi Kurang:	
-	0
Saldo per 31 Desember 2022	0
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	0
Nilai Buku per 31 Desember 2022	0

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.10. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya Rp 0,-

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah Rp0 dan Rp0,-. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
.				



1	Aset Tak Berwujud	0	0	0
2	Aset Lain-lain	0	0	0
	JUMLAH	0	0	0

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil.

Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

C.11 Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari
KPPN Rp0,-

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp.0,-.

Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

C.12 Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak
Ketiga
Rp794,483,-

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp762,275,748,- dan Rp1,410,336,513,-.

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta IV per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1.	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	794,483	Belanja Telepon yang dibayar bulan januari 2023
2.	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0	Dana pihak ketiga yang belum dipindahbukukan / ditrasfer ke pihak yang berhak dan dana yang masih dalam proses



			identifikasi dan konfirmasi
	Total	794,483	

C.13 Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya
Rp0

Nilai Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar 0,- dan Rp0,-.

Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada Kas Umum Negara dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta IV per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1.	Utang Jangka Pendek Lain-Lain	0	Penjelasan dimunculkan karena pada tahun 2019, terdapat pengembalian belanja yang belum disetorkan hingga Pelaporan Keuangan TA 2022
	Total	0	

C.14 Ekuitas

Ekuitas
Rp725,885,408,-

Ekuitas per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp725,885,408,- dan Rp725,885,408,-. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.



**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
JAKARTA IV**

*Jl. PRAJURIT KKO USMAN DAN HARUN NOMOR 10 JAKARTA PUSAT
TELEPON 021 3448363,3440910, FAXIMILE 021 3448363*



D. PENJELASAN ATAS POS- POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pendapatan PNBP
Rp52,882,923,451,-

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp52,882,923,451,- dan Rp 19,463,840,543,-. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak TA 2022 dan TA 2021

Uraian	REALISASI TA 2022	REALISASI TA 2021	Naik (Turun)%
Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	31,959,877,772	10,825,643,523	
Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	3,899,155,718	6,367,761,590	
Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	17,023,889,961	2,270,493,430	
Jumlah	52,882,923,451	19,463,840,543	171.698

Pendapatan Jasa merupakan Pendapatan-LO yang diperoleh dari Jasa Lelang, pengurusan Piutang Negara, yang berasal dari transaksi tahun 2022.

D.2. Beban Pegawai

Beban Pegawai Rp0,-

Jumlah Beban Pegawai pada 31 Desember tahun 2021 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp569,893,663,-. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.



Rincian Beban Pegawai
TA 2021 dan TA 2019

Uraian	REALISASI TA 2022	REALISASI TA 2021	Naik (Turun) %
Beban Gaji dan tunjangan	0	0	0
Beban Lembur	0	0	
Jumlah	0	0	0

D.3 Beban Persediaan

Beban Persediaan
Rp193,997,999,-

Jumlah Beban Persediaan pada 31 Desember tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp193,997,999,- dan Rp222,118,450,-. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan
TA 2022 dan TA 2021

Uraian Jenis Beban	REALISASI TA 2022	REALISASI TA 2021	Naik (Turun) %
Beban Persediaan Konsumsi	193,997,999	222,118,450	12,66
Beban Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan	0	0	0,00%
Beban Persediaan Suku Cadang	0	0	0,00%
Beban Persediaan Lainnya	0	0	0,00%
Jumlah	193,997,999	222,118,450	12,66

D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan
Jasa Rp870,918,270,-

Jumlah Beban Barang dan Jasa 31 Desember tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp870,918,270,- dan Rp981,050,601,-. Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa
TA 2022 dan TA 2021



<i>Uraian</i>	<i>Realisasi TA 2022</i>	<i>Realisasi TA 2021</i>	<i>Naik (Turun)%</i>
Beban Keperluan Perkantoran	573,560,901	680,818,305	
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	-	0	
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	23,280,905	45,595,700	
Beban honor Operasional Satuan Kerja	162,336,000	164,982,000	
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	20,432,260	9,382,071	
Beban Barang Operasional Lainnya	30,315,250	17,248,000	
Beban Bahan	15,746,600	16,943,000	
Beban Honor Output Kegiatan	0	0	
Beban barang Non Oprasional Lainnya	26,974,000	12,060,000	
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	9,666,000	24,929,765	
Beban Langganan Telepon	9,494,354	9,091,760	
Jumlah	870,918,270	441.299.508	(11.135)

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp164,720,190,- dan Rp157,788,600,-. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2022

*Beban Pemeliharaan
Rp164,720,190,-*



dan 2021 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Pemeliharaan
TA 2022 dan TA 2021*

<i>Uraian</i>	<i>Realisasi TA 2022</i>	<i>Realisasi TA 2021</i>	<i>Naik (Turun)%</i>
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	0	0,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	164,720,190	157,788,600	4.393
Beban Pemeliharaan Lainnya	0	0	0,00
Jumlah	164,720,190	157,788,600	4.393

D.6 Beban Perjalanan Dinas

*Beban Perjalanan
Dinas
Rp202,362,658,-*

Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp202,362,658,- dan Rp138,102,862,-. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Penurunan beban perjalanan dinas pada tahun 2021 disebabkan penurunan pagu perjalanan dinas KPKNL Jakarta IV yang sudah tidak melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka revaluasi BMN dan juga penghematan dalam rangka penanganan COVID-19. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2021 dan 2019 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Perjalanan Dinas
TA 2022 dan TA 2021*

<i>Uraian</i>	<i>Realisasi TA 2022</i>	<i>Realisasi TA 2021</i>	<i>Naik (Turun)%</i>
Beban Perjalanan Dinas Biasa	52,212,658	16,002,862	
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	150,150,000	122,100,000	
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	0	
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	0	



Jumlah	202,362,658	138,102,862	46.53
---------------	-------------	-------------	--------------



Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp191,868,147,-

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp191,868,147,- dan Rp170,624,355. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2021 dan 2019 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
TA 2022 dan TA 2021*

<i>Uraian</i>	<i>REALISASI TA 2022</i>	<i>REALISASI TA 2021</i>	<i>Naik (Turun)%</i>
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	191,868,147	170,624,355	
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	0	
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan	0	0	
Beban Penyusutan, Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	0	0	
Jumlah Penyusutan	191,868,147	170,624,355	12.451
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	0	0	0,00%
Beban Penyusutan Aset Lain-lain	0	0	0,00%
Jumlah Amortisasi	0	0	0,00%
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	191,868,147	170,624,355	12.451



Beban Penyisihan
Piutang Tidak
Tertagih
Rp0,-

D.8 Belanja COVID-19

Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk 31 Desember tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp,-. Beban Penyusutan Piutang Tidak Tertagih merupakan beban untuk mencatat alokasi piutang tidak tertagih. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2021 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
TA 2021 dan TA 2019

Uraian	REALISASI TA 2021	REALISASI TA 2019	Naik (Turun)%
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	0	0	0
Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	0	0	0

D.9 Kegiatan Non Operasional

Surplus/Defisit dari
Kegiatan Non
Operasional Rp0,-

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional 31 Desember tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional
TA 2022 dan TA 2021

Uraian	Realiasi TA 2021	Realisasi TA 2019	Naik (Turun)%
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0
Penjualan Alat Angkut Darat	0	0	0
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	0	0	0%
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	0	0	0
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0	0	0
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	0	0	0



Penjualan Alat Kantor	0	0	0,00%
Defisit Selisih Kurs	0	0	0,00%
Surplus (Defisit dari Kegiatan Non Operasional)	0	0	0

*) pendapatan/beban penyesuaian Nilai persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO).



**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
JAKARTA IV**

*Jl. PRAJURIT KKO USMAN DAN HARUN NOMOR 10 JAKARTA PUSAT
TELEPON 021 3448363,3440910, FAXIMILE 021 3448363*



E. PENJELASAN ATAS POS- POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1. Ekuitas Awal

Ekuitas Awal
Rp725,885,408,-

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2022 dan 2021 adalah masing masing sebesar Rp725,885,408,- dan Rp 541,547,298,-.

E.2. Surplus (Defisit) LO

Surplus LO
Rp51,259,056,187,-

Jumlah Surplus LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp51,259,056,187,- dan Rp. 17,806,361,675,-.

Surplus LO merupakan selisih tambah Antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional dan pos luar biasa.

E.3. Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai
Tahun Berjalan
Rp0,-

Jumlah Penyesuaian Nilai Aset untuk periode Tahun Anggaran 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0. Merupakan nilai penyesuaian nilai aset yang berasal dari persediaan.

E.4. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai
Persediaan
Rp0,-

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk tahun 2022 dan 2021 adalah masing masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

No	Jenis Persediaan	Koreksi
1	Barang Konsumsi	0
2	Suku Cadang	0
3	Barang Persediaan Lainnya	0
	Jumlah	0

E.5. Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset
Tetap
Rp0,-

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.



E.6. Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap
Rp0,-

Koreksi Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Rincian Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

No	Jenis Aset Tetap	Koreksi
1	Peralatan dan Mesin	0
2	Gedung dan Bangunan	0
	Jumlah	0

E.7. Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain
Rp0,-

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari:

Rincian Koreksi Lain-Lain

No	Jenis Beban	Koreksi
1	Koreksi Beban	0
2	Koreksi Pendapatan	0
3	Koreksi Piutang	0
4	Koreksi Kewajiban	0
5	Koreksi Hibah	0
	Jumlah	0

E.8. Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar
Entitas
Rp(51,315,520,902)

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp(51,315,520,902) dan Rp(17,622,023,565). Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas



No	Transaksi Antar Entitas	Nilai
1	Diterima dari Entitas Lain	52,882,923,451
2	Ditagihkan ke Entitas Lainnya	(1,453,644,424)
3	Transfer Masuk	0
4	Transfer Keluar	0
5	Pengesahan Hibah Langsung	0
6	Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	0
	Jumlah	51,315,520,902

E.9. Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir
Rp669,420,693,-

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember Tahun 2022 dan 2021 adalah masing masing sebesar Rp669,420,693,- dan Rp 725,885,408.



**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
JAKARTA IV**

*Jl. PRAJURIT KKO USMAN DAN HARUN NOMOR 10 JAKARTA PUSAT
TELEPON 021 3448363,3440910, FAXIMILE 021 3448363*



F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

a. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta IV sampai dengan periode 31 Desember 2022 telah melakukan revisi anggaran sebanyak 11 kali dengan rincian sebagai berikut :

1. Revisi pertama sampai dengan kelima KPKNL melakukan revisi Rencana Penarikan dana
2. Revisi Keenam, Usulan Revisi Anggaran yang ditujukan kepada DJA (Anggaran tambahan Top Down terkait SBSK dan Sertifikasi);
3. Revisi Ketujuh dan kedelapan, dilakukan untuk keperluan revisi POK
4. Revisi kesembilan dilakukan untuk perbaikan Rencana Penarikan Dana;
5. Revisi kesepuluh dan kesebelas dilakukan untuk pergeseran POK

